

PERSEPSI ORANG TUA SISWA DAN GURU TENTANG PENDIDIKAN DASAR GRATIS

Syamsu Alam Hamid*

ABSTRACT

This study aimed to determine 1) whether they (parents and teachers) have a clear understanding of the free education policy 2). How their perceptions about the meaning of "free" in the administration of education services as well as the role and responsibility of government stork, parents and other stakeholders in the implementation of free primary education policy. 3) How do they think about the model of implementation of free primary education policy, including the role of society in overseeing the program. (FGD - Focus Group Discussion) is used as the primary method to achieve the objectives of this research. Parents of students and teachers realize that education is the main factor and the needs of future asset depan. Biaya important as education becomes a major factor when parents want to send their anaknya. Terutama of families of middle economic strata, feel experiencing difficulties with respect to the cost of education is getting more expensive. This is due in addition to the rising prices of basic needs is also the need for additional school expenses necessary to improve the quality of education of children, also there is still performed peraktek school tuition fees. In addition BOS considered not effective in helping parents to overcome the limitations of school needs.

Keywords : Perception, Education, Free.

PENDAHULUAN

Disebutkan dalam UUD 45 (amandemen) dan Undang Undang No.20/2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa pendidikan dasar merupakan hak dari setiap warga negara dan oleh karena itu setiap warga negara (usia 7-15 tahun) wajib mengikuti pendidikan dasar. Dalam rangka pencapaian pendidikan dasar secara universal, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan dasar bagi setiap warga negara tersebut, khususnya bagi golongan keluarga yang tidak mampu, dan hal ini akan dituangkan dalam kebijakan pendidikan dasar gratis (*free basic education policy*).

Sejauh mana kebijakan pendidikan dasar gratis ini dapat mencapai pendidikan dasar universal sangat tergantung pada definisi tentang apa yang disebut 'gratis' serta kondisi dimana kebijakan tersebut dilaksanakan, termasuk kemampuan fiskal pemerintah dan pemerintah daerah.

*) Staf Pengajar Kopertis Wil. IX Sulawesi DPK pada FKIP – UNASMAN

Dalam konteks perhitungan biaya untuk implementasi kebijakan tersebut, perlu dilakukan analisa yang tajam tentang berbagai standar pelayanan pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan termasuk SPM (Standar Pelayanan Minimum) bidang pendidikan – sebagai basis dalam perhitungan satuan biaya (*unit cost*) untuk penyelenggaraan layanan pendidikan dasar.

Guna pembantu pemerintah Indonesia dalam implementasi kebijakan pendidikan dasar, Bank Dunia melalui Dana Hibah Belanda (*Dutch Trust Fund*) akan membiayai studi yang memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah tentang alternatif terbaik dalam melaksanakan kebijakan pendidikan dasar gratis. Khususnya studi tersebut akan menggali 3 aspek pokok: i) analisis konsep; ii) analisa budget; iii) strategi implementasi.

Untuk memperkaya studi tersebut, perlu dimasukkan informasi tentang persepsi orang tua siswa dan guru mengenai konsep pendidikan dasar gratis melalui sebuah studi tambahan. Luaran dari studi tambahan ini adalah informasi tentang bagaimana persepsi orang tua siswa dan guru mengenai arti 'gratis' dalam pendidikan, serta bagaimana persepsi mereka tentang berbagai tanggung jawab yang berbeda dari pemerintah, orang tua siswa dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dasar.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka permasalahan yang ingin dianalisis adalah; 1) Apakah mereka (orang tua siswa dan guru) mempunyai pemahaman yang

Jelas tentang kebijakan pendidikan gratis sebagaimana yang tersurat dalam amandemen UUD 1945 serta Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. 2). Bagaimana persepsi mereka tentang arti "gratis" dalam penyelenggaraan Layanan pendidikan serta bagaimana peran dan tanggung jawab dari pemerintah, orang tua siswa dan berbagai pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan pendidikan dasar gratis. 3) Bagaimana pendapat mereka tentang model implementasi kebijakan pendidikan dasar gratis termasuk peran masyarakat dalam mengawasi jalannya program.

METODE PENELITIAN

Diskusi kelompok terfokus (FGD- Focus Group Discussion) digunakan sebagai metoda utama untuk mencapai tujuan penelitian ini. FGD yang melibatkan 8 hingga 12 orang peserta perkelompok ini di Fasilitasi oleh seorang Fasilitator dan Notulis (Note taker). Fasilitator dan notulis berasal dari kalangan Perguruan Tinggi dan LSM setempat. Sebelum terjun kelapangan terlebih dahulu mereka mendapatkan arahan (briefing) yang diberikan oleh konsultan ahli, terutama yang berkaitan etika dan tehnik-tehnik kefasilitatoran, juga pendalaman pertanyaan kunci sesuai panduan diskusi kelompok yang telah disiapkan. Untuk keperluan studi ini telah dikembangkan 1 set panduan diskusi

kelompok serta kerangka pertanyaan pokok dan tambahan yang telah disetujui oleh konsultan ahli.

Studi ini dilakukan di Kota Makassar pada 3 (tiga) kecamatan terpilih yang mewakili kategori ekonomi kaya, sedang dan miskin. Pemilihan kecamatan dengan strata ekonomi tersebut didasarkan atas kategori yang dikembangkan pada program Bantuan Langsung Tunai yang disempurnakan (Conditional Cash Transfer Program). Pemilihan Kecamatan kecamatan dengan menggunakan strata ekonomi tersebut akan dikaitkan dengan pemilihan peserta FGD yang akan mewakili kelompok masyarakat kaya, sedang dan miskin.

Sebagaimana yang dibahas pada sub pembahasan Peserta FGD, pada setiap kecamatan dilakukan 1 (satu) kali FGD dengan peserta orang tua siswa yang menggambarkan strata ekonomi kecamatan dimaksud. Selain itu dilakukan 1 (satu) kali FGD dengan peserta guru dan kepala sekolah yang pesertanya direkrut dari keterwakilan 3 (tiga) kecamatan terpilih. Dengan demikian ditingkat Kota Makassar secara keseluruhan dilakukan 4 (empat) kali FGD.

FGD 1; peserta adalah orang tua siswa dari keluarga miskin yang bertempat tinggal di kecamatan miskin terpilih (Kecamatan Ujung Tanah). Jumlah peserta FGD 12 orang, dengan komposisi orang tua yang anaknya masih sekolah di SD/MI/SMP/MTs (negeri atau swasta), termasuk orang tua yang memiliki lebih dari satu anak yang sedang bersekolah. Juga direkrut orang tua dari anak yang putus sekolah. Komposisi peserta telah diupayakan seimbang antara laki dan perempuan. Termasuk yang direkrut satu orang peserta dari anggota Komite Sekolah dari unsur masyarakat.

FGD 2; peserta adalah orang tua siswa dari keluarga menengah yang bertempat tinggal di kecamatan ekonomi menengah terpilih (Kecamatan Rappocini). Jumlah peserta FGD 12 orang, dengan komposisi orang tua yang anaknya masih sekolah di SD/MI/SMP/MTs (negeri atau swasta), termasuk orang tua yang memiliki lebih dari satu anak yang sedang bersekolah. Juga merekrut orang tua dari anak yang putus sekolah. Komposisi peserta telah diupayakan seimbang antara laki dan perempuan. Termasuk yang direkrut satu orang peserta dari anggota Komite Sekolah dari unsur masyarakat.

FGD 3; peserta adalah orang tua siswa dari keluarga kaya yang bertempat tinggal di kecamatan ekonomi kaya terpilih (Kecamatan Mariso). Jumlah peserta FGD 12 orang, dengan komposisi orang tua yang anaknya masih sekolah di SD/MI/SMP/MTs (negeri atau swasta), termasuk orang tua yang memiliki lebih dari satu anak yang sedang bersekolah. Juga merekrut orang tua dari anak yang putus sekolah. Komposisi peserta telah diupayakan seimbang antara laki dan perempuan. Termasuk yang direkrut satu orang peserta dari anggota Komite Sekolah dari unsur masyarakat.

FGD 4; peserta adalah guru dan kepala sekolah dari beberapa sekolah yang berlokasi di kecamatan ekonomi kaya, menengah dan miskin terpilih. Jumlah peserta FGD ini dibatasi maksimum 10 orang, dengan komposisi guru

dan kepala sekolah tingkatan SD/SMP (MI/MTS) baik negeri ataupun swasta. Pemilihan peserta dari kelompok orang tua siswa menurut strata ekonomi (miskin, sedang dan kaya) dilakukan secara purposive setelah terlebih dahulu mempertimbangkan masukan dari masyarakat setempat. Konsultasi dengan masyarakat setempat ini merupakan keharusan agar Peneliti (Fasilitator) tidak salah dalam memilih peserta diskusi.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Wilayah Studi

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mariso, Kecamatan Rappocini dan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar dengan gambaran singkat lokasi sebagai berikut; Kecamatan Mariso merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota Makassar dengan batas-batas wilayahnya; disebelah utara dengan Kecamatan Ujung Pandang, disebelah timur Kecamatan Mamajang disebelah selatan Kecamatan Tamalate, dan disebelah barat berbatasan selat makassar.

Kecamatan Mariso merupakan daerah datar dengan topografi ketinggian wilayah sampai dengan 500 m dari permukaan laut. Luas wilayahnya 1,84 Km², dengan jumlah penduduk 52.803 jiwa yang terdiri penduduk laki-laki : 25,893 jiwa dan perempuan sekitar 26.910 jiwa. Dengan demikian ratio jenis kelamin adalah sekitar 96.225 yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 96 orang penduduk laki-laki.

Secara umum penduduk di komunitas ini cukup beragam dari segi suku, agama dan penduduk. Rata-rata mereka berpendidikan menengah keatas dengan mata pencaharian sebagai pedagang, pengusaha/wiraswasta, karyawan swasta dan PNS. Sedangkan gambaran karakteristik (latar belakang sosial) responden (peserta diskusi) di Kecamatan Mariso ini, menunjukkan pekerjaan yang menonjol adalah yang mewakili pengusaha muda dan karyawan swasta dengan umur responden antara 29 -47 tahun, sedangkan tingkat pendidikan responden pada umumnya Sarjana (Diploma III 3 orang, S1 4 orang dan S2 1 orang). Sisanya 4 orang dari SMA dan yang sederajat.

Kecamatan Rappocini merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota Makassar yang berbatasan dengan Kecamatan Panakkukang disebelah utara, Kecamatan Panakkukang dan Kabupaten Gowa disebelah timur, Kecamatan Tamalate disebelah selatan dan Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Makassar di sebelah barat.

Karakteristik Orang Tua Siswa.

Besarnya partisipasi orangtua terhadap penyelenggaraan pendidikan anak banyak dipengaruhi oleh karakteristik dan latar belakang sosial dari orang tua. Olehnya itu, sangat penting untuk melihat karakteristik dan latar belakang sosial orang tua yang dideskripsikan sebagai berikut :

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 38 orang (16 laki-laki atau 42%% dan 22 perempuan atau 58%), yang terdiri dari Kecamatan Mariso; 12 orang (8 laki-laki, 4 perempuan), Kecamatan Rappocini; 12 orang (4 laki-laki dan 8 perempuan) serta Kecamatan Ujung Tanah 14 orang (4 laki-laki, 10 perempuan). Besarnya jumlah responden perempuan dikarenakan survei diadakan pada siang hari, sedangkan sebagian besar dari Ayah bekerja pada siang hari, begitu juga rata-rata rumah tangga yang diundang untuk menghadiri FGD (fokus group discussion) lebih memilih mengutus Ibu Rumah Tangga, karena Ibu Rumah Tangga dianggap lebih mengetahui seluk beluk pengurusan pendidikan anak-anaknya.

TEMUAN POKOK DAN ANALISIS HASIL STUDI.

Dalam analisis data-data lapangan yang diperoleh pada tiga wilayah ' penelitian, dapat digamabarkan sebagai berikut :

Persepsi Mengenai Kebutuhan Pendidikan.

Berdasarkan hasil FGD antara warga miskin, menengah dan guru dari tiga wilayah penelitian, diperoleh simpulan bahwa pada prinsipnya para orang tua dan guru menganggap pendidikan penting bagi anak-anak mereka, dan apapun yang terjadi orang tua memiliki niat atau cita-cita untuk menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya. Hanya yang menjadi kendala utama adalah masalah biaya pendidikan, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama keperluan dapur saja sudah pas-pasan.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa pendapat orang tua dan guru pada data berikut: Pendidikan anak-anak di Cambayya Ujung Tanah, memang rata-rata rendah, ya...biasanya hanya sampai SD. Bahkan banayak yang tidak tamat, sudah berhenti sekolah.faktor utama karena tidak punya biaya....Sebenarnya para orang tua berkeinginan anaknya bersekolah tinggi. Tapi keadaan yang memaksa. Anak anak juga banyak yang tidak terpanggil bahkan malas bersekolah karena keadaan kita terbatas. Rata-rata warga disini bekerja sebagai nelayan, penjual ikan dan buruh.kami termasuk penduduk berekonomi lemah.sesuai faktanya memang orang tua menyekolahkan anaknyaya asal sekolah...karena mau pilih sekolah yang bagus berkualitas, pasti dites dan biayanya mahal.jadinya ...anak-anak disini sekolah diwilayah pinggiran.karena pengaruh lingkungan dan bekerja membantu orang tua...rata-rata anak-anak tidak teratur sekolahnya.jadi sekolah tapi tidak tekun belajar.

Sekarang ini warga masyarakat sudah mengetahui pentingnya ada sekolah agar anak- anak memiliki keterampilan untuk masa depannya,,,apalagi sudah sering dijanjikan oleh Pemerintah untuk menggratiskan pendidikan.....hanya saja banyak penghambatnya juga, ya...terutama pada anaknya yang malas sekolah...juga karena ada persaingan.....anak-anak kita disini tidak mampu orang tuanya, jadi tidak bisa ikut les atau proram

tambahan.....apalagi kalau ada pembayaran lain lagi, seperti beli buku paket.....dan biasanya hanya sampai SD saja. Untuk sekolah ke yang lebih tinggi, mengalami kesulitan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat diketahui bahwa sebenarnya semua masyarakat berpersepsi bahwa pendidikan itu penting dan sangat dibutuhkan, baik sebagai kebanggaan orang tua, kewajiban orang tua, dan juga sebagai pembekalan orang tua terhadap anak-anaknya. Cita-cita mereka untuk menyekolahkan anaknya sangat tinggi, tetapi kendala utama adalah biaya sekolah dan ketidak mampuan mereka untuk mengakses pelayanan pendidikan yang bermutu.

Persepsi tentang biaya sekolah.

Upaya peningkatan mutu pendidikan perlu didukung oleh semua pihak yang menjadi tanggung jawab bersama, hal ini bisa terlaksana jika para penyelenggara pendidikan terutama pihak sekolah dan komite sekolah punya kesungguhan dan i'tikad baik memajukan pendidikan. Sebab sesuai realita dilapangan keberadaan penyelenggara sekolah (kepala sekolah dan jajarannya, komite sekolah), dipersepsikan hanya menjadi beban masyarakat (para orang tua siswa) dimana setiap tahunnya selalu saja ada celah yang dimanfaatkan untuk melakukan berbagai pungutan. Dengan demikian para orang tua yang menginginkan agar penyelenggaraan sekolah betul-betul digratiskan, justru merasa hanya dijadikan sebagai sapi perahan atas praktek-praktek eksploitasi, seperti penjualan buku pelajaran, buku LKS, bahkan penggalangan dana yang melibatkan komite sekolah pada awal tahun ajaran baru melalui sumbangan uang pembangunan. Fakta-fakta hasil FGD pada orang tua siswa dipaparkan sebagai berikut : *Susana Pak, nakke keluarga kasiyasi, tena pammali bukunna, terusteruski disuruh beli buku Cetak, kamma kammanna gurua cetak buku, nampa nasuru balli anak-anakka, lampa tena kulle ammali ri tampai maarai ri gurua tompa, lampa ia tonji tentukan hargana.* (susah Pak, Saya keluarga miskin, tidak ada pembeli buku, sering-sering disuruh beli buku cetak/LKS.guru yang siapkan lalu anak yang beli, dan tidak bisa beli ditempat lain, harganya sudah ditentukan guru.(Daeng Kulle).

Pengalaman saya. Saya punya anak di SD. sebagai orang tua sangat bersyukur dengan adanya pendidikan gratis, seperti dibebaskan SPP.hanya saja masih sering ada biaya-biaya lain yang ditarik dilingkungan sekolah, seperti KTK yang diharuskan dibeli, ada perlombaan keindahan sekolah yang dibebankan keanak, Jadi memang sudah tidak ada lagi biaya SPP, tetapi pembayaran lain masih ada terutama pada tahun ajaran baru dengan pungutan uang sumbangan dan pungutan-pungutan lainnya sangat rentan untuk disalah gunakan dan itu sudah banyak contoh kejadaian; beberapa Kepala Sekolah dan pengurus komite sekolah diperiksa di Kejari Makassar.(Ros)

Kalau kita lihat sekarang kurikulum sering berubah-ubah. Inilah yang dimanfaatkan untuk bisnis buku pelajaran setiap semester. secara kasat mata terlihat terjadi kolusi antara guru dan penerbit yang mengeksploitasi anak-anak dan orangtua. (Irwan)

Katanya ada uang BOS. Ada keadaan anak dapat bea siswa seharusnya dipanggil kita orang tuanya untuk membicarakan, ini malah diatur sendiri pihak sekolah, jadi tidak ada komunikasi dengan orang tua murid, sehingga bea siswa tidak jadi diterima karena katanya dialihkan kebiaya lain. Orang tua tidak mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang dana BOS,... Apa Tujuannya?.....item-item mana saja yang dibayarkan? (Sam)

Sebenarnya orang tua dari kelompok ekonomi rendah menyadari pentingnya pendidikan anak, namun karena kendala biaya dan ketidakmampuan memanfaatkan akses layanan pendidikan yang baik dan bermutu membuat beberapa orang tua kurang termotivasi mengusahakan dan memperjuangkan pendidikan anaknya sehingga banyak anak yang putus sekolah. Tidak lanjut sekolah setelah tamat SD bahkan ada orang tua bersikap yang penting bersekolah, tidak perlu disekolahkan disekolah yang mutunya bagus. Seperti pengungkapan dibawah ini :

Jai pabayaranna punna lanjuki, bajikangnga assulumi, katambang inrang nakana gurua (banyak pembayaran jikalau lanjut, lebih baik berhenti saja, daripada nanti bertambah lagi pinjaman. (Sam).

Disini ada sekolah DDI, mudah masuknya, pembayaran tidak susah, biar anak-anak tidak masuk sekolah satu minggu, tidak apa-apa. Terpaksa anak saya disitumi saja sekolah, karena tidak memberatkan pembayarannya.....sewaktu-waktu juga bisa cari kerja. Itulah resiko sekolah murah....tapi tidak dijamin mutunya. (Pit).

Sementara dari orang tua kelas menengah keatas, sebagian beranggapan bahwa peningkatan pendidikan yang bermutu hanya bisa dicapai jika didukung oleh dana pembiayaan sekolah yang mencukupi. Oleh karena keuangan sekolah yang diperoleh dari pemerintah tentu terbatas untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu baik dari segi kualitas tenaga pengajarnya, sarannya, maupun pengembangan program pembelajarannya, maka wajar orang tua membantu dan berpartisipasi dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, yang penting dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil FGD tersebut diatas, maka diketahui bahwa para orang tua (terutama dari warga ekonomi rendah) menganggap biaya sekolah sudah digratiskan, namun tetap saja diperlukan adanya pengeluaran tambahan yang harus ditanggung orang tua, termasuk adanya praktek-praktek pungutan dari guru/sekolah. hal ini dirasakan peserta cukup memberatkan. Kondisi ini yang menyebabkan para orang tua siswa dari kalangan ekonomi rendah terpaksa menempuh menyekolahkan anaknya seadanya saja, karena mereka tidak punya akses untuk menyekolahkan anaknya pada sekolah-sekolah yang bermutu.

Berbeda dari orang tua siswa dari kalangan menengah keatas, sebagaimana memaklumi kalau penyelenggaraan pendidikan itu memberi kesempatan orang tua untuk berpartisipasi dari segi pembiayaan untuk menjamin kualitas mutu pendidikan.

Persepsi tentang iuran sekolah.

Iuran sekolah adalah seluruh jenis iuran yang dibayar orang tua ke sekolah, menurut orang tua dari strata ekonomi rendah (miskin) seharusnya sekolah sekarang betul-betul gratis, tidak ada lagi pembayaran lain(iuran sekolah) baik negeri maupun swasta. Sedangkan dari kelompok ekonomi menengah dan yang lebih mapan, sebagian menginginkan agar sekolah negeri tidak perlu memungut iuran oleh karena pemerintah sudah menyiapkan subsidi pendidikan dalam rangka program wajib belajar 9 tahun. Sebagian orang tua lagi berpendapat sebaiknya sekolah negeri tetap memungut iuran dengan alasan, sekalipun sekolah negeri di subsidi oleh pemerintah tetapi belum tentu dapat membiayai dan memenuhi kebutuhannya. Terutama pada sekolah-sekolah yang dianggap mempunyai pengelolaan proses belajar mengajar dengan mutu yang bagus tentu membutuhkan pembiayaan yang cukup memadai. Hanya saja pembayarannya bisa diatur dengan sistem silang yang disesuaikan kemampuan ekonomi orang tua. Yang kategori kaya mensubsidi yang lemah. Hal tersebut dapat dilihat pada fakta-fakta sebagai berikut ini: Untuk pendidikan 9 tahun tidak perlu iuran karena pemerintah yang harus menanggungnya, dana pendidikan yang dari pemerintah kan uang rakyat juga, tetapi pelaksanaannya banyak yang diselewengkan. Ada BOS sekolah tidak mencukupi tapi ada BKS, dana BKS itu sampai sofanya sekolah ada dananya tersedia kurang lebih ada 16 jenis bantuan untuk pendidikan dasar. Untuk SD dan SMP sekolah negeri tidak usah bayar lagi, karena guru juga sudah dilipatgandakan gajinya, perhatikan sekarang guru rata-rata sudah pakai mobil. Dana BOS, dana BKS ada untuk peralatan olah raga dan seni itu. anggarannya sampai 20 juta. (Alimuddin).

Uang iuran sekolah dishare antara sekolah dan orang tua terutama untuk program-program media pengembangan kreatifitas anak. Tergantung ekonomi orang tua, yang miskin dibebaskan saja (tidak membayar apapun), tetapi yang kaya tetap membayar, apalagi jika dilakukan dengan kebersamaan, bias semua berpartisipasi, orang kaya menyumbang uang, mungkin orang miskin bisa menyumbang pada kegiatan yang memerlukan tenaga. (Iviet).

Sedangkan persepsi guru dan kepala sekolah tentang "bagaimana sebaiknya sekolah negeri, apakah diizinkan untuk meminta iuran dari orang tua agar dapat menutupi kebutuhan sekolah" ? Ada guru yang menyatakan sebaiknya tidak ada lagi pungutan untuk iuran sekolah negeri, agar anak-anak betul-betul sekolah (terutama dari keluarga miskin) agar tidak mengalami hambatan lagi untuk mengikuti proses belajar mengajar dan memungkinkan bisa menyelesaikan pendidikannya dari tingkat SD sampai atamat minimal SMP.

Tetapi sebagian besar guru berpandangan sebaiknya sekolah negeri tetap memungut iuran terutama pada keluarga kaya. Mereka cenderung agar iuran sekolah tetap diterapkan untuk sekolah-sekolah favorit atau sekolah unggulan. Penerapan iurannya dibedakan antara keluarga kaya dan keluarga miskin. Keluarga kaya tetap dikenakan iuran dan keluarga miskin dibebaskan dari iuran sekolah melalui subsidi silang yang diterapkan secara tepat dan konsisten. Sebab jika system subsidi silang ini bisa dilaksanakan, diharapkan dapat mengurangi gap/jarak antara keluarga kaya dan keluarga miskin. Penerapan system ini juga memberi peluang pada anak-anak dari golongan keluarga miskin untuk mendapatkan pelayanan akses terhadap pendidikan yang bermutu. Berikut penuturan peserta FGD :kalau iuran sekolah mau diteraapkan, bisa dengan menggunakan sistem subsidi silang, hanya perlu terlebih dahulu ada data yang akurat tentang klasifikasi kesejahteraan orang tua siswa yang masuk kategori kaya, sedang dan miskin. Inilah model sekolah gotong royong yang bisa membangun kebersamaan semua strata masyarakat. Jangan hanya anak dari keluarga mampu saja yang bisa menyekolahkan anaknya pada sekolah favorit (sekolah unggulan), tetapi anak-anak dari keluarga miskin juga bisa bersekolah yang bermutu dengan sistem subsidi silang.

Dalam rangka menerapkan sistem subsidi silang, maka syarat utama yang harus ada adalah tersedianya data klasifikasi kesejahteraan orang tua siswa. Jadi perlu pemetaan atau sensus social yang akurat diterima oleh seluruh warga orang tua siswa. Untuk menginisiasi ini, perlu dilibatkan komite sekolah agar hasil penentuan tingkatan kesejahteraan social orang tua siswa legitimate dan bisa diterima semua pihak.

Pada peraktek yang pernah dilakukan oleh orang tua siswa tergambar iuran pengeluaran biaya sekolah menurut besarnya beban pengeluaran pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Tingkat Sekolah Dasar:

SD	Besarnya Biaya (Rp)
1. Uang buku pelajaran	Rp. 150 ribu – 250 ribu
2. Uang baju seragam	Rp. 120 ribu
3. Uang komite	Rp. 20 ribu (swasta)/bulan
4. Uang UAN/UAS	Rp. 50 ribu – 100 ribu
5. Uang jajan	Rp. 5 ribu- 10 ribu/hari
6. Uang ekstrakurikuler	Rp. 10 ribu/bulan
7. Uang transport	Rp. 3 ribu/hari
8. Uang gedung/sumbangan awal tahun	Rp. 150 ribu
9. Uang kursus/les sekolah	Rp. 20 ribu/bulan
10. Uang computer	Rp. 10 ribu/bulan
	Rp. 100 ribu (untuk negeri)

11. Uang masuk sekolah (kalau dibawah 7tahun)	
---	--

Tingkat Sekolah Menengah Pertama

SMP	Besarnya Biaya (Rp)
1. Uang buku pelajaran	Rp. 250 ribu – 400 ribu
2. Uang UAN/UAS	Rp. 200 ribu
3. Uang baju seragam	Rp. 200 ribu – 350 ribu
4. Uang Praktikum	Rp. 15000/kegiatan (4 kali sebulan)
5. Uang ekstrakurikuler	Rp. 20 ribu/bulan (kegiatan social)
6. Uang saku/jajan	Rp. 10 ribu-20 ribu/hari
7. Uang OSIS	Rp. 2 ribu/hari
8. Uang transport	Rp. 10 ribu – 15 ribu/hari
9. Uang komputer	Rp. 7500 ribu-20 ribu/bulan
10. Uang kursus/les sekolah	Rp. 20 ribu/bulan
11. Uang komite	Rp. 30 ribu – 50 ribu/bulan
12. Uang gedung / sumbangan awal tahun	Rp. 600 ribu – 1.5juta/awal masuk

Menurut peserta prioritas biaya yang ditanggung orang tua dan pemerintah sebagai berikut:

SD	
<p>Biaya yang seharusnya ditanggung Pemerintah: Uang komite/BP3 Uang gedung Uang buku pelajaran Uang praktikum Uang computer Uang UAS/UAS Uang ekstrakurikuler Uang les sekolah</p>	<p>Biaya yang seharusnya ditanggung orang tua : Uang saku/ jajan Uang transport Uang baju seragam Uang buku tulis Les diluar sekolah</p>

SMP	
<p>Biaya yang seharusnya di tanggung Pemerintah :</p> <ul style="list-style-type: none"> Uang komite/BP3 Uang buku pelajaran Uang UAN/UAS Uang praktikum Uang gedung Uang komputer Uang OSIS Uang ekstrakurikuler Uang Pramuka Uang les sekolah 	<p>Biaya yang seharusnya di tanggung orang tua :</p> <ul style="list-style-type: none"> Uang saku/jajan Uang transport Uang baju seragam Uang buku tulis Uang kursus Uang Les diluar

Dari pemaparan persepsi diatas, menunjukkan bahwa bahwa baik pada biaya operasional maupun pada biaya investasi, orang tua dari keluarga miskin cenderung memprioritaskan pada kebutuhan yang mendesak untuk kegiatan pembelajaran dikelas, dirumah, peraktek laboratorium maupun untuk administrasi ketatausahaan sekolah seperti; alat tulis dan habis pakai, media pembelajaran (buku dan multi media) dan perlengkapan peralatan. Sedangkan dari dari keluarga mapan menganggap penting untuk diprioritaskan pembiayaan yaitu menyangkut peningkatan kualitas guru dan kesejahteraanya. Setelah itu memprioritaskan hal-hal yang berkaitan dengan media pembelajaran (buku pembelajaran, multi media, alat tulis, dan bahan habis pakai, peralatan dan perlengkapan serta sarana dan prasarana. Dengan prioritas – prioritas tersebut diharapkan dapat mendorong upaya pencapaian mutu pendidikan yang lebih baik dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan diharapkan sudah terhindar dari praktek-praktek bisnis yang mengeksploitasi anak dan orang tua siswa.

Persepsi Orang Tua Siswa tentang Pendidikan Gratis

Persepsi mengenai pendidikan dasar gratis diyakini oleh para orang tua sebagai salah satu faktor yang sangat menentukan proses belajar lancar dan bermutu. dianggap program pendidikan gratis sangat membantu meringnkan beban keluarga yang kurang mampu memenuhi biaya pendidikan anak-anaknya. Melalui layanan pedidikan gratis diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan bagi siswa/siswi, terutama dari keluarga miskin atau tidak mampu dapat mengenyam pendidikan sebagaaimana mestinya guna mendukung program wajib belajar sembilan tahun. Berdasarkan penuturan warga dalam FGD di Kelurahan Cambayya Kecamatan Ujung Tanah, sebagai berikut :

.....melalui program pendidikan gratis ini, kami orang tua siswa sangat terbantu dalam pembiayaan pendidikan anak saya. Apalagi suami saya yang bekerja sebagai penjual ikan yang penghasilannya pas-pasan hanya untuk kebutuhan makan saja. mudah-mudahan iuran yang sering ditagih dulu betul-

betul sudah tidak ada lagi. Supaya anak-anak kami bisa selesai sekolahnya, tanpa putus sekolah. Karena yang menyebabkan putus sekolah itu karena tidak mampu lagi bayar berbagai iuran sekolah yang harus dibayar. (Ros)

Sementara itu, pihak orang tua dari keluarga yang lebih mapan berpandangan program pendidikan gratis bisa bermanfaat jika dilakukan dengan melibatkan semua elemen dan institusi masyarakat yang mempunyai kepedulian dan komitmen terhadap dunia pendidikan. Institusi-institusi yang ada sekarang ini seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah agar peran dan fungsinya bisa lebih efektif dan sesuai tujuan pembentukannya harus dilakukan melalui proses yang selektif dengan berdasar pada prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dikontrol oleh masyarakat (community control). Selain itu perlu dimaksimalkan semua potensi pengawasan seperti lembaga independen/LSM, pemerhati pendidikan, dan anggota DPRD kalau perlu para anggota DPRD diberi target untuk melakukan pembinaan pada sekolah-sekolah yang berada dibawah diwilayah asal pemilihannya. Respon orang tua tentang pendidikan gratis dapat dilihat berikut ini:

Keterlibatan orang tua murid dengan mengetahui rencana BOS. Bahan pembelajaran atau peralatan yang mau dibeli, pengadaannya, melibatkan semua orang tua siswa sehingga perlu terbuka dan dipertanggungjawabkan. Pengalaman baru-baru ini terkucur dana BOS, ada strukturnya ada LSM dan wartawan yang saya lihat jelas lembaga independen tidak jelas kredibilitasnya hampir semua wartawan mendekati kepala sekolah pada saat terkucur dana yang terjadi bukannya dikontrol tapi ternyata wartawan dan LSM meminta persen untuk menutupi soal biaya mark up yang dilakukan kepala sekolah.

Mengenai model alternatif pendidikan gratis, peserta FGD mengharapkan agar orang tua siswa dilibatkan, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan program BOS. Keterlibatan semua orang tua siswa mengetahui pengadaan dan pemanfaatan dana BOS itu, untuk menghindari adanya penyelewengan atau penyalahgunaan. Sebab dana yang dikelola setiap sekolah tentu besar, dan dana itu pada hakekatnya adalah hak para murid atau orang tua siswa, jadi wajarlah jika para orang tua dilibatkan. Hal terungkap dari FGD sebagai berikut :.....sebaiknya para orang tua dihadirkan secara terjadwal untuk diberikan penjelasan atau sosialisasi terkait pelaksanaan program BOS disetiap sekolah, sebab sudah sering diberitakan surat kabar adanya penyalahgunaan dana BOS ini, jika ini yang terjadi pasti yang dirugikan para murid dan orang tua, yang pada akhirnya penyelenggaraan pendidikan tidak maksimal. Contohnya saja....masih ada diantara kita para orang tua disini yang sering tidak mendapatkan buku paket belajar, atau ada tetapi bergantian dengan temannya yang lain untuk mempergunakannya.nah...kenapa bukunya tidak cukup. Apa memang anggarannya yang tidak disediakan atau bagaimana....hal-hal seperti ini perlu penjelasan supaya jelas bagi orang tua.(Marnix)

.....kita para orang tua sangat terbantu dengan adanya pendidikan gratis, hanya saja kita mau agar dana yang dikucurkan pemerintah itu dapat optimal digunakan dan dimanfaatkan betul-betul untuk kepentingan belajarnya anak-anak kita. memang sudah bebas SPP, tetapi bagaimana dengan buku-bukunya, maupun kebutuhan lainnya. Sebab masih sering ada orang tua yang mengeluh karena masih ada praktek memungut iuran untuk kegiatan tertentu. Jadi sosialisasi yang kurang dan sistem pengawasan atau pengaduan kalau ada keluhan atau hal penting yang mau disampaikan.(Alimuddin)

Berdasarkan hasil-hasil FGD diatas, menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan gratis sangat membantu meringankan biaya pendidikan yang ditanggung orang tua, juga membantu memperlancar proses kegiatan belajar mengajar. Hanya saja para orang tua dari strata ekonomi mapan, sedang dan yang miskin menghawatirkan pemanfaatan dana pendidikan gratis (BOS) yang relatif cukup besar disetiap sekolah itu tidak efektif dan optimal karena pengelolaannya rentan diselewengkan atau disalah gunakan. Hal ini dirasakan para orang tua karena selama ini dianggap programnya kurang tersosialisasi dan kurang melibatkan orang tua.

SIMPULAN

Orang tua siswa dan guru menyadari bahwa pendidikan menjadi faktor utama dan kebutuhan penting sebagai asset masa depan. Pendidikan menjadi hak setiap warga Negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 dan Undang-Undang sisdiknas, sehingga pemerintah berkewajiban menyelenggarakannya melalui program pendidikan gratis, terutama untuk sekolah dasar dan menengah.

Biaya pendidikan menjadi faktor utama ketika orang tua ingin menyekolahkan anaknya. Terutama dari keluarga strata ekonomi menengah kebawah, merasakan mengalami kesulitan sehubungan dengan biaya pendidikan yang semakin mahal. Hal ini disebabkan selain meningkatnya harga kebutuhan pokok juga adanya kebutuhan tambahan biaya sekolah yang diperlukan guna meningkatkan kualitas pendidikan anak, juga masih adanya praktek pungutan iuran yang dilakukan disekolah. Selain itu dana BOS dianggap belum efektif dalam membantu keterbatasan orang tua dalam menanggulangi kebutuhan sekolah.

Terkait biaya sekolah, Orang tua siswa menyadari tidak semata-mata harus menjadi tanggung jawab penuh pemerintah. Seharusnya biaya-biaya yang menjadi hak orang tua, seperti uang saku/jajan, buku tulis, alat tulis, uang kursus, dan sebagainya dapat dipenuhi sendiri oleh orang tua siswa. Namun jika terjadi hal-hal yang kasuistis, dimana terdapat orang tua dari keluarga miskin yang sama sekali tidak mampu

memenuhi tanggung jawabnya, maka harus ada kebijakan khusus untuk memastikan setiap anak dalam usia wajib belajar tetap bersekolah.

Persepsi orang tua terhadap prioritas biaya penyelenggaraan pendidikan yang harus dibiayai Pemerintah; Para orang tua dari keluarga berpenghasilan rendah cenderung memprioritaskan pada kebutuhan yang mendesak untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, baik pembelajaran dikelas, dirumah dan peraktek laboratorium maupun untuk administrasi ketatausahaan sekolah, sehingga diprioritaskanlah seperti buku paket pembelajaran, multi media, alat tulis dan bahan habis pakai, pelengkapan peralatan dan sarana prasarana. Sedangkan dari keluarga yang lebih mapan menganggap penting untuk diprioritaskan pembiayaan yang menyangkut peningkatan kualitas dan profesionalisme guru dan kesejahteraannya serta kelengkapan sarana prasarana.

Penyelenggaraan pendidikan gratis, perlu memperbanyak dan memperluas sosialisasinya keseluruh orang tua siswa mengenai program dan system pengelolaannya, jika perlu masyarakat (para orang tua siswa, terutama dari keluarga miskin) juga diberikan penguatan untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan dana BOS.

Pelaksanaan dana BOS rentan diselewengkan, pada hal dana BOS tersebut adalah milik bersama, maka penggunaannya juga harus diawasi bersama. Model pengawasan bersama akan mengurangi potensi pihak pengelola Dana BOS untuk melakukan penyelewengan. Untuk itu maka perlu ada ruang partisipasi sebagai berikut : 1) Komite sekolah terlibat dalam pengelolaan Dana Bos; 2) Terdapat perwakilan orang tua murid diluar komite sekolah yang masuk dalam Manajemen Tim BOS terlibat dalam pengelolaan. 3) Orangtua berhak dan harus mendapatkan sosialisasi program; 4) Melalui komite sekolah, masyarakat (orang tua) mengetahui pembelian dan pemanfaatan barang barang; 5) Ada system monitoring evaluasi dan pelayanan penanganan pengaduan masyarakat yang fungsional.

REKOMENDASI

1. Program pendidikan gratis harus lebih dioptimalkan guna mewujudkan harapan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Pelibatan dan ruang partisipasi secara bersama harus diciptakan dalam pengelolaan dan pengendaliannya agar dana Bos betul-betul optimal dan berdaya guna.
2. Perlunya para pelaksana BOS lebih meningkatkan lagi sosialisasi program BOS baik dilingkungan sekolah maupun pada masyarakat umum.
3. Perlunya diwujudkan sistem pengelolaan yang menjamin orang tua melalui Komite sekolah terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestariannya.

4. Perlunya penguatan kapasitas Komite sekolah dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan pendidikan gratis, khususnya pengelolaan BOS yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Hawa, Penelope, Deudre Degeling and Jane Hall, 1990. "How To Run A Focus Group" in Penelope (eds.). *Evaluating Health Promotion: A Health Workers Guide*, Sydney: Maclenan & Petty.

Knodel, John, 1993. "The Design And Analysis of Focus Group Studies: A Practical Approach" in David Morgan (ed.). *Successful Focus Group: Advancing the State of Art*. Newbury Park, Ca: Sage.

Module 10C: Focus Group Discussion.